



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif, efisien, bersih dan responsif serta akuntabel.

Rencana kerja tahun 2021 ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Rencana Kerja ini juga merupakan upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih tahun 2016-2021 yaitu ***“Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis”***, dimana fokus atau tema pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2021 adalah ***“Kapuas Hulu Daerah Konservasi dan Beranda NKRI yang Maju”***.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja DPMPSTP Kabupaten Kapuas Hulu akan sangat diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan yang lebih baik dan meningkatnya realisasi investasi di daerah.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang dinamis sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap strategis dan sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah.

Putussibau, Maret 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos.,M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19710312 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .	16
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31
3.3. Program dan Kegiatan.....	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB V PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengamanatkan tentang penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah sebagai perencanaan tahunan dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah. Dokumen Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berisi program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalamnya juga memuat kebijakan, permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan program-program serta kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), diharapkan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan

dan sinergi dengan program-program OPD lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada

tahun 2021. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021;
- b. Merumuskan program dan kegiatan prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
- c. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah;
- d. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- e. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- f. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.
- g. Untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Anggaran Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dengan penyerapan anggaran dinas yang ditargetkan 95% sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar 96,81% atau sebesar Rp. .4.676.371.291,- (*empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*) dari total anggaran dinas sebesar Rp. 4.830.307.000,- (*empat milyar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah*) dengan realisasi belanja langsung sebesar

Rp. 2,824,627,201.00 (*dua milyar delapan ratus dua puluh empat enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah*) atau 95,97% dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2,943,234,000.00 (*dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) ,sedangkan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1,851,744,090,- (*satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh rupiah*) atau 98,13% dari total anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1,887,073,000,- (*satu milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah*).

Realisasi anggaran tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya yang hanya sebesar 93,87% dari total alokasi anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu senantiasa berusaha untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh anggaran dapat terserap maksimal.

Realisasi atau hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut :

1. Hasil pelaksanaan kegiatan pada Bagian Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Sasaran meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah terrealisasi di triwulan I dengan telah disampaikannya hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kab. Kapuas Hulu dengan nilai “BB” . Adapun nilai evaluasi pelayanan

publik oleh Ombudsman di tahun 2019 telah diterima dengan rata-rata 88 atau kategori hijau (tinggi).

- b. Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dengan indikator kinerja prosentase sarana dan prasaana aparatur dalam kondisi baik yang ditargetkan 80% sampai dengan akhir tahun 2019 ini terealisasi dengan prosentase 90% (baik).
 - c. Sasaran meningkatnya disiplin aparatur dengan indikator kinerja prosentase kehadiran pegawai dalam 1 tahun yang ditargetkan 93% di triwulan IV mengalami sedikit kenaikan. Realisasi kehadiran pegawai dalam 1 tahun ini harus dipertahankan dan ditingkatkan agar jangan sampai menurun di tahun-tahun berikutnya.
 - d. Sasaran meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan indikator kinerja nilai LAKIP OPD masih dalam proses penyusunan, dan diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu. Sedangkan penyerapan anggaran dinas yang ditargetkan 95% sampai dengan triwulan IV dapat terrealisasi sebesar 96,81% atau berhasil memenuhi target kinerja.
 - e. Memastikan segala sarana prasarana kerja dan keperluan rutin Dinas dalam keadaan baik dan terpenuhi segala kebutuhan rutin Dinas merupakan tugas pokok yang harus dijalankan pada Bagian Sekretariat.
2. Hasil pelaksanaan kegiatan pada Bidang Penanaman Modal dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan Pemantauan ,Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal, hasil yang dicapai yaitu melaksanakan kegiatan pengendalian penanaman modal berdasarkan dengan indikator jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan.
- b. Pada kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah, telah dilaksanakan mengikuti sebanyak 2 (dua) *event* pameran, yaitu Kalbar Expo di PCC Pontianak pada tanggal 11 – 15 September 2019 dan Bandung Inavest di Braga City Walk Bandung pada tanggal 20-22 September 2019. Dengan demikian telah dapat memenuhi target mengikuti pameran sebanyak 2 (dua) *event* atau terrealisasi 100%.
- c. Kegiatan Pengelolaan SIPID merupakan upaya untuk menyajikan data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah secara terpadu, lengkap dan akurat kepada publik, khususnya calon investor. Dengan memberikan informasi yang diperlukan oleh calon investor ini, mereka dapat menentukan pilihan dari berbagai alternative peluang investasi yang ada melalui aplikasi SIPID.
- d. Kegiatan penyusunan ICOR merupakan upaya untuk menyajikan nilai ICOR menurut lapangan usaha yang dilengkapi dengan kajian terpadu, lengkap dan akurat di Kab. Kapuas Hulu. Penghitungan nilai ICOR ini dapat digunakan untuk menghitung besaran tambahan investasi atau pembentukan modal tetap bruto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan.

- e. Kegiatan Koordinasi Teknis Perencanaan merupakan kegiatan mengikuti rapat dan pertemuan serta koordinasi teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang menjadi agenda tahunan, yaitu KP3MR dan KP3MN, serta rapat koordinasi teknis di tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
3. Adapun laporan pelaksanaan kegiatan dari Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal adalah sebagai berikut :
- a. Sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan dengan indikator kinerja rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan yang ditargetkan 3-5 hari sudah terealisasi 100%. Realisasi rata-rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi penurunan dan tetap terealisasi 100%.
 - b. Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu dengan indikator kinerja nilai SKM yang ditargetkan 78 (Baik) terealisasi dengan nilai 84,78 (Baik). Realisasi nilai SKM ini berasal dari total 230 responden sebagai sampel yang merupakan pengunjung DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu, dimana maksud kunjungan mereka untuk mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan.
 - c. Jumlah izin tervalidasi sebanyak 338 izin dari kurang lebih 800 permohonan izin yang masuk dengan nilai realisasi investasi sebesar 607,50 Milyar. Nilai realisasi ini terutama berasal dari proyek PMDN

yang bergerak di sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, yang bernilai di atas 200 juta Rupiah.

Adapun repaitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kabupaten Kapuas Hulu**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11
						Urusan									
						Bidang Urusan									
						PENANAMAN MODAL									
1	02	12	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
						Kegiatan :									
1	02	12	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai / perangko	300	150	200	200	100%	200	550	100%
1	02	12	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan	12	12	12	12	100%	12	36	100%
1	02	12	01	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak / Tahun	18	10	11	11	100%	12	12	100%
1	02	12	01	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang dibayar honorarium pengelola keuangan dan jasa operator	16	16	16	16	100%	16	96	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11
1	02	12	01	01	008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan lingkungan gedung kantor	12	12	12	12	100%	12	36	100%
1	02	12	01	01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara / perbaiki	30	17	17	17	100%	17	51	100%
1	02	12	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item alat tulis kantor	50	50	50	50	100%	50	150	100%
1	02	12	01	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan pengadaan	8	8	8	8	100%	8	24	100%
1	02	12	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	75	75	75	75	100%	75	225	100%
1	02	12	01	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah langganan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	7	7	7	7	100%	7	21	100%
1	02	12	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian dan rapat kantor	4.720	6.163	6.163	6.163	100%	6.163	18.489	100%
1	02	12	01	01	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah paket rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	44	44	45	45	100%	50	139	100%
1	02	12	01	01	019	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Paket rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	42	42	42	42	100%	45	129	100%
1	02	12	01	01	022	Pengelolaan kearsipan di lingkungan SKPD	Jumlah paket kearsipan yang dikelola	1	1	1	1	100%	1	3	100%
1	02	12	01	01	026	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah orang yang bayar honorarium	3	3	3	3	100%	5	11	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11
1	02	12	01	01	027	Peaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan SKPD	Jumlah dokumen								
1	02	12	01	01	031	Penyusunan RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen	3	3	3	3	100%	3	9	100%
1	02	12	01	01	036	Penyediaan Jasa Pendukung perkantoran	Jumlah pegawai honorer yang dibayarkan honorarium	3	3	3	3	100%	5	9	100%
1	02	12	01	01	042	Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	Jumlah paket monev	4	4	4	4	100%	4	12	100%
1	02	12	01	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
						Kegiatan :									
1	02	12	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/opersional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang diadakan								
1	02	12	01	02	09	Penyediaan sarana pendukung kantor	Jumlah paket penyediaan sarana pendukung kantor								
1	02	12	01	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	1	2	2	2	100%	2	6	100%
1	02	12	01	03		Peningkatan Disiplin Aparatur									
						Kegiatan :									
1	02	12	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	27	27	-	-	100%	30	57	100%
1	02	12	01	03	05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	27	-	27	27	100%	-	27	100%
1	02	12	01	05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11
1	16	02	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	16	16	16	16	100%	12	45	100%
1	02	12	01	06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
						Kegiatan :									
1	02	12	01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relaisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	100%
1	02	12	01	06	002	Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran SKPD dan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen	2	2	2	2	100%	2	6	100%
1	02	12	01	06	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	100%
1	02	12	01	06	016	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) SKPD	Jumlah dokumen	10	10	10	10	100%	10	30	100%
1	02	12	01	06	026	Pendataan dan pengelolaan aset SKPD	Jumlah dokumen	2	2	2	2	100%	2	6	100%
1	02	12	01	06	030	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Jumlah dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	100%
1	02	12	01	06	036	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11
1	02	12	01	06	042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	100%
1	02	12	01	06	047	Penyusunan laporan tahunan	Jumlah dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	100%
1	02	12	01	06	048	Penyusunan laporan reformasi birokrasi	Jumlah dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	100%
1	02	12	01	15		Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									
						Kegiatan :									
1	02	12	01	15	013	Penyelenggaraan Pameran Investasi Daerah	Jumlah event pameran yang diikuti	2	2	2	2	100%	2	6	100%
1	02	12	01	15	015	Pengelolaan sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID)	Jumlah kegiatan up date data	2	2	2	2	100%	2	6	100%
1	02	12	01	15	019	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	45	45	45	45	100%	45	135	100%
1	02	12	01	16		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									
						Kegiatan :									
1	02	12	01	16	013	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi	6	6	-	-	100%	-	6	100%

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11
1	02	12	01	16	020	Rapat koordinasi teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah paket rapat teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal	3	3	3	3	100%	3	9	100%
1	02	12	01	16	019	Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	-	1	-	-	100%	-	1	100%
1	02	12	01	16	021	Penyusunan ICOR Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	-	-	1	1	100%	-	1	100%
1	02	12	01	19		Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan									
						Kegiatan :									
1	02	12	01	19	001	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengawasan	3	3	3	3	100%	4	10	100%
1	02	12	01	19	013	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah laporan	1	1	1	1	100%	1	3	100%
1	02	12	01	19	014	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelayanan keliling	1	1	1	1	100%	1	3	100%
1	02	12	01	19	017	Penataan perizinan	Jumlah dokumen	3	3	3	3	100%	3	9	100%
1	02	12	01	19	019	Publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan	Jumlah publikasi	2	2	2	2	100%	2	6	100%
1	02	12	01	19	020	Penyusunan laporan perkembangan PTSP Kabupaten	Jumlah laporan	1	1	1	1	100%	1	3	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi : membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan pengembangan semua kegiatan di bidang penanaman modal dan perizinan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksana urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Adapun pencapaian kinerja maupun hal-hal yang menjadi kekuatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Adanya peningkatan disiplin dan kinerja;
2. Adanya upaya peningkatan pelaksanaan penataan peraturan perundang-undangan;
3. Adanya upaya pelaksanaan pengidentifikasian terhadap tumpang tindihnya tugas dan fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja;
4. Adanya standar pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur serta

berkepastian dan transparan;

5. Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel;
6. Budaya dan tingkat akuntabilitas kinerja birokrasi semakin meningkat;
7. Penyampaian LHKPN dan LHKASN yang tertib;
8. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan semakin meningkat, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan dan mengakses informasi.

Beberapa permasalahan pada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut, diantaranya :

- 1) belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana pelayanan dan perkantoran;
- 2) minimnya alokasi anggaran yang tersedia;
- 3) terbatasnya tenaga teknis untuk pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 4) belum lengkapnya dokumen perencanaan pengembangan investasi daerah;
- 5) belum optimalnya upaya promosi daerah;
- 6) belum optimalnya fungsi pengendalian penanaman modal dan perizinan berusaha.

Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta meningkatkan nilai investasi di daerah.

Sedangkan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Predikat SAKIP			CC	CC	B	BB	B	BB	BB	BB	
2.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat			76	77	78	79	81,37	84,78	78	79	
3.	Nilai realisasi investasi PMDN (Milyar rupiah)			139	173	226	299	863	607.50	299	398	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisa sebagai berikut :

- a) Sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu, dengan indikator kinerja predikat SAKIP “B”, terealisasi dengan predikat “BB” untuk penilaian kinerja tahun 2018.
- b) Sasaran meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu dengan indikator kinerja nilai survei kepuasan masyarakat (SKM) yang ditargetkan dengan nilai 77 (baik), terealisasi dengan nilai 84,78 (baik) dengan jumlah responden sebanyak 230 orang responden.
- c) Sasaran meningkatkan realisasi investasi di daerah dengan indikator kinerja realisasi investasi yang ditargetkan sebesar 226 Milyar terealisasi sebesar 607,50 Milyar atau sebesar 269%. Nilai realisasi investasi tersebut berasal dari proyek PMDN di sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan (sumber data realisasi investasi triwulan IV BKPM RI dan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu).

Dari hasil analisa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penyelenggara

pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif dan efisien, serta mampu memberikan kontribusi terhadap tercapainya misi ke 2 daerah yaitu **memperkuat ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan.**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. **Belum lengkapnya dokumen perencanaan pengembangan investasi daerah.** Hal ini berpengaruh terhadap perencanaan pengembangan investasi di daerah. Karena dengan adanya dokumen perencanaan pengembangan investasi yang lengkap dan disertai data-data yang akurat akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan yang menggerakkan perekonomian daerah dengan menarik datangnya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu.
2. **Belum optimalnya upaya promosi daerah.** Hal ini berpengaruh terhadap upaya DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu untuk mempromosikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu agar lebih dikenal luas, terutama di kalangan investor potensial.
3. **Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha.** Hal ini disebabkan masih belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan, serta masih kurangnya kuantitas , kualitas dan kompetensi tenaga teknis yang menjadi ujung tombak pelayanan perizinan berusaha DPMPTSP Kabupaten Kapuas

Hulu.

4. **Belum optimalnya fungsi pengendalian penanaman modal dan perizinan berusaha.** Hal ini berpengaruh terhadap jumlah perusahaan yang tertib administrasi dengan melaporkan perkembangan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan jumlah pemilik usaha yang memenuhi komitmen.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu tahun 2016-2021 . Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukan perlunya penambahan beberapa kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh :

1. Amanat Permendagri 86 Tahun 2017 terkait waktu dan mekanisme perubahan RPJP dan RPJMD;
2. Penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
3. Adanya perubahan peraturan tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di tingkat Nasional.

Beberapa perubahan (penambahan) kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain :

1. Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

2. Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kapuas Hulu.

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Rp. 1.410.237.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Rp 1.186.149.400	
	Penyediaan jasa surat menyurat > Belanja materai / perangko	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya materai	300 Materai	Rp 1.500.000	Penyediaan jasa surat menyurat > Belanja materai / perangko	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya materai	300 Materai	Rp 1.300.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Belanja telepon, air, listrik dan internet	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Rp 35.420.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Belanja telepon, air, listrik dan internet	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Rp 64.200.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional > Pembayaran pajak kendaraan dinas	Kab. Kapuas Hulu	Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional	Pajak 2 Unit mobil dan 12 unit motor	Rp 4.500.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional > Pembayaran pajak kendaraan dinas	Kab. Kapuas Hulu	Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional	Pajak 2 Unit mobil dan 12 unit motor	Rp 4.250.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan jasa operator	Kab. Kapuas Hulu	Terbayarnya jasa pengelolaan keuangan dan operator	16 Orang	Rp 76.098.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan jasa operator	Kab. Kapuas Hulu	Terbayarnya jasa pengelolaan keuangan dan operator	16 Orang	Rp 90.180.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Terpeliharanya lingkungan gedung kantor	1 Tahun	Rp 29.312.000	Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Terpeliharanya lingkungan gedung kantor	1 Tahun	Rp 56.011.600	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > -	Kab. Kapuas Hulu	Terpeliharanya peralatan kantor	20 Unit	Rp 21.600.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > -	Kab. Kapuas Hulu	Terpeliharanya peralatan kantor	20 Unit	Rp 20.000.000	
	Penyediaan alat tulis kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya alat tulis kantor	50 Item	Rp 42.457.000	Penyediaan alat tulis kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya alat tulis kantor	50 Item	Rp 50.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8 Item	Rp 14.850.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8 Item	Rp 17.503.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	75 Buah	Rp 3.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor>-	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	75 Buah	Rp 7.932.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit Laptop, 4 Unit Tablet, 1 Set Sound Sistem, 10 Unit Printer	Rp 250.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit Leptop, 4 Unit Tablet, 1 Set Sound Sistem, 10 Unit Printer	Rp 90.850.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Surat kabar, 10 Kali Iklan	Rp 18.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Surat kabar, 10 Kali Iklan	Rp 19.360.000	
	Kegiatan penunjang pemerintah lainnya > -	, Tentative	Terlaksananya kegiatan penunjang pemerintah lainnya	1 Tahun	Rp 30.000.000	Kegiatan penunjang pemerintah lainnya > -	, Tentative	Terlaksananya kegiatan penunjang pemerintah lainnya	1 Tahun	-	
	Penyediaan makanan dan minuman > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat kantor	4.720 makanan dan minuman	Rp 54.000.000	Penyediaan makanan dan minuman > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat kantor	4.720 makanan dan minuman	Rp 69.600.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah > -	, Tentative	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	50 kali	Rp 466.000.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah > -	, Tentative	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	50 kali	Rp 455.000.000	
	Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah > -	, Tentative	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	30 Kali	Rp 110.000.000	Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah > -	, Tentative	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	30 Kali	Rp 75.000.000	
	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya honorarium pengadaan barang dan jasa	3 Orang	Rp 3.500.000	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya honorarium pengadaan barang dan jasa	3 Orang	Rp 5.863.000	
	Penyusunan RKA dan DPA > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	Rp 5.000.000	Penyusunan RKA dan DPA > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	Rp 5.767.000	
	Penyediaan jasa pendukung kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya jasa tenaga kontrak	5 Orang	Rp 77.000.000	Penyediaan jasa pendukung kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya jasa tenaga kontrak	5 Orang	Rp 101.997.000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas > -	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas	20 Kali	Rp 168.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas > -	Kab. Kapuas Hulu	Jumlah rapat	4 Kali	Rp 25.000.000	
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		0		Rp 1.711.700.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		0		Rp 55.606.800	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional> -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya kendaraan dinas/operasio nal kantor	1 Unit mobil	Rp 300.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional >-	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya kendaraan dinas/operasio nal kantor	-	-	
	Perencanaan pembangunan gedung kantor>-	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya Perencanaan pembangunan gedung kantor	1 Paket	Rp 250.000.000	Perencanaan pembangunan gedung kantor>-	Kab. Kapuas Hulu	Tersediannya Perencanaan pembangunan gedung kantor	-	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 set kursi tamu, 10 buah kursi dan meja kerja eselon, 5 set kursi tunggu	Rp 200.000.000	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit lemari, 3 unit filling cabinet, 1 unit tangga, 5 unit notebook, 6 unit printer, 2 unit scanner, 4 unit kursi, 10 unit kursi staf, 5 unit rak buku, 1 unit kamera	Rp. 114.451.000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor > Pembangunan tempat parkir	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya tempat parkir kendaraan	1 Paket	Rp 200.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor > Pembangunan tempat parkir	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya tempat parkir kendaraan	-	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	Rp 150.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > -	Kab. Kapuas Hulu	Terpeliharanya gedung kantor	-	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional> -	Kab. Kapuas Hulu	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	2 Unit mobil, 8 Unit motor	Rp 100.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Kapuas Hulu	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	2 Unit mobil, 8 Unit motor	Rp 55.606.800	
	Pengadaan peralatan gedung kantor > Penyediaan instalasi jaringan LAN	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya instalasi jaringan LAN	1 Paket	Rp 139.700.000	Pengadaan peralatan gedung kantor > Penyediaan instalasi jaringan	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya instalasi jaringan LAN	-	-	
	Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya pusat data server aplikasi dan pengamanan	1 Paket	Rp 350.000.000	Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya pusat data server aplikasi dan pengamanan	-	-	
3.	Program peningkatan disiplin aparatur		0		Rp 88.000.000	Program peningkatan disiplin aparatur		0		Rp 40.000.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya >-	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	29 Stel	Rp 45.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya >-	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	-	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu >-	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	29 Stel	Rp 43.000.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu >-	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	29 Stel	Rp 40.000.000	
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0		Rp 395.000.000	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0		Rp 120.000.000	
	Pendidikan dan pelatihan formal >-	, Tentative	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	12 Orang	Rp 395.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal > -	, Tentative	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	16 Orang	Rp 120.000.000	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0		Rp 77.300.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0		Rp 59.578.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp 4.500.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp 8.004.000	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD	1 Dokumen	-	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Rp 4.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Rp 5.265.000	
	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya analisis beban kerja dan analisis jabatan	2 Dokumen	Rp 12.000.000	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya analisis beban kerja dan analisis jabatan	2 Dokumen	-	
	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya SOP	10 Dokumen	Rp 22.000.000	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya SOP	10 Dokumen	Rp 17.894.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD	1 Dokumen	Rp 3.000.000	Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD	1 Dokumen	Rp 6.189.700	
	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya DUK dan Daftar Nominatif Pegawai	1 Dokumen	Rp 8.000.000	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya DUK dan Daftar Nominatif Pegawai	1 Dokumen	Rp 7.000.000	
	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya LPPD SKPD	1 Dokumen	Rp 8.000.000	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya LPPD SKPD	1 Dokumen	-	
	penyusunan laporan tahunan > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan tahunan SKPD	1 Dokumen	Rp 7.000.000	penyusunan laporan tahunan > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan tahunan SKPD	1 Dokumen	-	
	Penyusunan Laporan Inventarisasi aset SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan inventarisasi aset SKPD	2 Dokumen	Rp 3.800.000	Penyusunan Laporan Inventarisasi aset SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya laporan inventarisasi aset SKPD	2 Dokumen	Rp 1.909.600	
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		0		Rp 744.000.000	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		0		Rp 469.334.000	
	Pameran investasi daerah > -	, Tentative	Terlaksananya pameran investasi daerah	3 Minat investor	Rp 290.000.000	Pameran investasi daerah > -	, Tentative	Terlaksananya pameran investasi daerah	3 Minat investor	Rp 252.308.000	
	Penyusunan data statistik penanaman modal	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya data statistik penanaman modal	1 Dokumen	Rp 75.000.000	Penyusunan data statistik penanaman modal	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya data statistik penanaman modal	1 Dokumen	-	
	Pengelolaan sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID)	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya informasi potensi investasi daerah (SIPID)	2 Kegiatan	Rp 20.000.000	Pengelolaan sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID)	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya informasi potensi investasi daerah (SIPID)	2 Kegiatan	Rp 47.026.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal > -	, Tentative	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	45 Perusahaan	Rp 279.000.000	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal > -	, Tentative	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	45 Perusahaan	Rp 170.000.000	
	Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya sarana dan prasarana promosi penanaman modal	450 Leaflet, 300 brosur, 50 Buah CD	Rp 80.000.000	Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya sarana dan prasarana promosi penanaman modal	450 Leaflet, 300 brosur, 50 Buah CD	-	
7	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		0		Rp 520.000.000	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		0		Rp 520.000.000	
	Workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	30 Perusahaan	Rp 50.000.000	Workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	30 Perusahaan	-	
	Sosialisasi kebijakan penanaman modal > -	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal	50 Perusahaan	Rp 34.000.000	Sosialisasi kebijakan penanaman modal > -	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya a sosialisasi kebijakan penanaman modal	50 Perusahaan	-	
	Penyusunan Perubahan Perda PM	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya penyusunan Perubahan Perda penanaman modal	1 Dokumen	-	Penyusunan Penyusunan Perubahan Perda PM	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya penyusunan Perubahan Perda penanaman modal	1 Dokumen	Rp. 391.406.000	
	Penyusunan Perubahan Perbup RUPM	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Penyusunan Perubahan Perbup RUPM	1 Dokumen	-	Penyusunan Perubahan Perbup RUPM	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Penyusunan Perubahan Perbup RUPM	1 Dokumen	Rp. 350.000.000	
	Rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal	Tentative	Terlaksananya rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal	3 Kali	Rp 85.000.000	Rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal	Tentative	Terlaksananya rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal	3 Kali	Rp 59.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.0)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.0)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Peta Potensi Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Penyusunan Peta Potensi Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 200.000.000	Penyusunan Peta Potensi Kab. Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Penyusunan Peta Potensi Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 201.600.000	
8	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		0		Rp 688.000.000	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		0		Rp 688.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan > -	, Tentative	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan	5 Kecamatan	Rp 178.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan > -	, Tentative	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan	5 Kecamatan	Rp 116.954.600	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Keliling > -	, Tentative	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan keliling Kab. KH	3 Kecamatan	Rp 234.000.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Keliling > -	, Tentative	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan keliling Kab. KH	3 Kecamatan	Rp 55.597.800	
	Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM) OPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya SKM OPD	Baik	Rp 87.000.000	Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM) OPD > -	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya SKM OPD	Baik	Rp 35.000.000	
	Penataan perizinan > -	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya penataan perizinan	1 Dokumen	Rp 64.000.000	Penataan perizinan > -	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya penataan perizinan	1 Dokumen	Rp 74.776.800	
	Fasilitasi dan koordinasi tentang pengaduan masyarakat > -	Kab. Kapuas Hulu	Pengaduaan yang ditangani dan ditindaklanjuti	3 Pengaduan	Rp 25.000.000	Fasilitasi dan koordinasi tentang pengaduan masyarakat > -	Kab. Kapuas Hulu	Pengaduaan yang ditangani dan ditindaklanjuti	3 Pengaduan	Rp -	
	Publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan > -	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan	2 Publikasi	Rp 100.000.000	Publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan > -	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan	2 Publikasi	Rp 175.000.000	

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan daerah tahun 2020 belum dilaksanakan . Namun berdasarkan tahun–tahun sebelumnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mendapat masukan program / kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Dalam Undang-Undang tersebut, PTSP diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan dimana proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pengertian ini berbeda dengan pengertian "pelayanan terpadu satu atap". Dalam Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pengertian "pelayanan terpadu satu atap" adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat untuk berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu, sedangkan "pelayanan terpadu satu pintu" adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

PTSP di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat Pusat, Propinsi atau Kabupaten/Kota. Lembaga yang dimaksud disini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah). Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi

antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh BKPM. Dalam melaksanakan PTSP, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 di atas, pada tingkat Nasional telah terdapat “payung” bagi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Hal yang berkaitan dengan apa itu pelayanan terpadu satu pintu, tujuan pembentukannya, kelembagaannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur lebih tegas. Ketegasan ini dapat menciptakan kepastian bagi aparat pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, kepastian bagi penanam modal, dan kepastian bagi masyarakat umum. Meskipun demikian, pengaturan ” payung” tersebut tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pelayanan terpadu satu pintu. Undang-Undang hanya mengatur pelayanan terpadu satu pintu secara umum dan memerintahkan penyusunan Peraturan Presiden untuk mengatur tata cara dan pelaksanaannya.

Adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), yaitu suatu sistem pemrosesan perizinan terintegrasi secara elektronik, menjadi upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia dan menciptakan model pelayanan terintegrasi yang cepat dan murah serta memberi kepastian. Dengan adanya OSS ini, masyarakat dapat mengakses layanannya secara daring di manapun berada. Manfaat OSS lainnya adalah :

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha,

maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin

2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Aturan baru ini tentu saja membawa dampak perubahan bagi DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga perlu melakukan banyak penyesuaian dan perbaikan. Terutama dari sisi aparaturnya, perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan OSS, karena DPMPTSP merupakan lembaga penyelenggara OSS di daerah. Dengan mengikuti berbagai pelatihan diharapkan dapat mengimplementasikan dalam pendampingan OSS dengan baik sesuai aturan yang berlaku dan dapat memberikan pelayanan perizinan yang lebih baik kepada masyarakat.

Adapun perizinan yang belum dapat diproses melalui OSS ini, proses penerbitannya menggunakan aplikasi SiCantik, yaitu Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi untuk Publik yang fungsi utamanya adalah untuk menyederhanakan proses perizinan. SiCANTIK sendiri merupakan aplikasi berbasis *web* yang nantinya akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang telah dicapai saat ini, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, meningkatkan kompetensi aparatur, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang telah dimiliki.

Tujuan 2 : Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan fungsi perencanaan penanaman modal, mengoptimalkan promosi dan kerjasama dengan berbagai pemangku

kepentingan, mengoptimalkan proses perizinan penanaman modal, dan meningkatkan fungsi pengendalian investasi.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati maka dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis yang dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Adapun sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP Kab Kapuas Hulu;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu;
3. Meningkatkan realisasi investasi di Daerah.

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kab Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan tiga Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Selanjutnya Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal, yang mana didukung dengan 3 program, yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
3. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Kemudian Sasaran 3 : Meningkatkan realisasi investasi di Daerah diarahkan pada upaya meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah baik Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, yang mana didukung dengan dua program, yaitu :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam masa periode renstra (2016-2021) serta indikator kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1

Tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu periode Renstra (2016-2021)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas Pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	CC	CC	CC	B	B	BB
		Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	76	77	78	79	80
2.	Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar rupiah)	112	139	173	226	299	398

Tabel diatas menunjukkan indikator predikat SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021 ditargetkan berpredikat “BB”. Sedangkan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2021 ditargetkan dengan nilai Baik (80 poin), serta indikator nilai realisasi investasi ditargetkan sebesar 299 Milyar.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 8 (delapan) program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efesiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program pelayanan administrasi perkantoran kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
5. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor;
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
12. Penyediaan Makanan dan Minuman;
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
15. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
16. Penyusunan RKA, DPA dan DPPA;
17. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran;
18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas;
19. Kegiatan Penunjang Program Pemerintah Lainnya;
20. Pengelolaan Kearsipan Dinas;
21. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
2. Pembangunan Gedung Kantor;
3. Penyediaan sarana pendukung kantor;
4. Pengadaan mebeleur;
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
6. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
7. Penyediaan instalasi jaringan komunikasi data;
8. Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan;
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan produktivitas kerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya;
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan publik sehingga menjadi aparatur yang profesionalisme. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dijabarkan pada kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD;
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
4. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD;

5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
6. Penyusunan Investarisasi Aset SKPD;
7. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD;
8. Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
9. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD;
10. Penyusunan Rencana Strategis SKPD
11. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD;
12. Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi SKPD;
13. Penyusunan Aalisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan SKPD;
14. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-0) SKPD.

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan promosi penanaman modal. Program Peningkatan dan pengembangan promosi penanaman modal dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Pameran investasi Daerah;
2. Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID);
3. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Penyusunan Data Statistik Publikasi Penanaman Modal;
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Ppromosi Penanaman Modal.

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi bertujuan untuk mendorong kegiatan investasi agar implementasi pembangunan dapat berjalan

lancar, aman dan efisien. Program ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu (SIMYANDU);
2. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana SIMYANDU;
3. Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kab. Kapuas Hulu;
4. Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
5. Peningkatan Kerjasama Kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN Skala Besar;
6. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal;
7. Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah;
8. Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal;
9. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
10. Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi;
11. Penyusunan ICOR.

8. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Hasil yang diharapkan dari program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan perizinan dan non perizinan. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan;
2. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
3. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling Kab. Kapuas Hulu;
4. Penataan Perizinan;

5. Pendataan Perizinan;
6. Fasilitasi dan Koordinasi Pengaduan Masyarakat;
7. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PTSP di Kabupaten Kapuas Hari;
8. Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan dan dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk direalisasikan. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan 8 (delapan) Program yang akan dilaksanakan agar Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk direalisasikan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program-program tersebut adalah :

1. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program pelayanan administrasi perkantoran kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
5. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor;
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
12. Penyediaan Makanan dan Minuman;
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
15. Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
16. Penyusunan RKA, DPA dan DPPA;
17. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran;
18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas;
19. Kegiatan Penunjang Program Pemerintah Lainnya;
20. Pengelolaan Kearsipan Dinas;
21. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
2. Pembangunan Gedung Kantor;
3. Penyediaan sarana pendukung kantor;
4. Pengadaan mebeleur;
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
6. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

7. Penyediaan instalasi jaringan komunikasi data;
8. Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan;
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan produktivitas kerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya;
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan publik sehingga menjadi aparatur yang profesionalisme. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dijabarkan pada kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD;
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
4. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD;
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
6. Penyusunan Investarisasi Aset SKPD;
7. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD;
8. Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
9. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD;
10. Penyusunan Rencana Strategis SKPD
11. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD;
12. Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi SKPD;
13. Penyusunan Aalisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan SKPD;
14. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-0) SKPD.

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan promosi penanaman modal. Program Peningkatan dan pengembangan promosi penanaman modal dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Pameran investasi Daerah;
2. Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID);
3. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Penyusunan Data Statistik Publikasi Penanaman Modal;
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Ppromosi Penanaman Modal.

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi bertujuan untuk mendorong

kegiatan investasi agar implementasi pembangunan dapat berjalan lancar, aman dan efisien. Program ini dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu (SIMYANDU);
2. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana SIMYANDU;
3. Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kab. Kapuas Hulu;
4. Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
5. Peningkatan Kerjasama Kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN Skala Besar;
6. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal;
7. Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah;
8. Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal;
9. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal;
10. Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi;
11. Penyusunan ICOR.

8. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Hasil yang diharapkan dari program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan perizinan dan non perizinan. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan;
2. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
3. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling Kab. Kapuas Hulu;
4. Penataan Perizinan;
5. Pendataan Perizinan;
6. Fasilitasi dan Koordinasi Pengaduan Masyarakat;

7. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PTSP di Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan.

Indikasi pendanaan program dan kegiatan Dinas PMPTSP didasarkan kepada program dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau *stakeholder* . Rumusan rencana program dan kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Kapuas Hulu

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2					Urusan Penanaman Modal								
1	2	12				Penanaman Modal								
1	02	12	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tindaklanjut hasil pemeriksaan Nilai evaluasi pelayanan publik		100% Baik	1,692,097,680.00	APBD			1,868,957,448.00
1	02	12	01	01	001	Belanja Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai/perangko	Kab. Kapuas Hulu	300 Materai	1,430,000.00	APBD		300 Materai	1,573,000.00
1	02	12	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Listrik, PDAM, Telepon dan Internet / Tahun	Kab. Kapuas Hulu	12 Bulan	68,640,000.00	APBD		12 Bulan	75,504,000.00
1	02	12	01	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak / Tahun	Kab. Kapuas Hulu	1 Unit Mobil, 11 unit motor	8,500,000.00	APBD		2 Unit Mobil	17,000,000.00
1	02	12	01	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan dan Jasa Operator	Kab. Kapuas Hulu	20 OB	118,338,000.00	APBD		20 OB	130,171,800.00
1	02	12	01	01	008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan lingkungan gedung kantor	Kab. Kapuas Hulu	12 Bulan	22,782,760.00	APBD		12 Bulan	25,061,036.00
1	02	12	01	01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara/perbaiki	Kab. Kapuas Hulu	40 Unit	39,680,000.00	APBD		30 Unit	43,648,000.00
1	02	12	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item alat tulis kantor	Kab. Kapuas Hulu	60 Item	60,839,020.00	APBD		60 Item	66,922,922.00
1	02	12	01	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	10 item	19,253,300.00	APBD		10 item	21,178,630.00
1	02	12	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Kab. Kapuas Hulu	200 Unit	8,725,200.00	APBD		85 Unit	9,597,720.00
1	02	12	01	01	013	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan / tahun	Kab. Kapuas Hulu	8 unit laptop, 10 unit desktop, 4 unit printer, 1 unit mesin keymatic antrian	195,250,000.00	APBD		5 unit laptop, 4 unit desktop	214,775,000.00
1	02	12	01	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah langganan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kapuas Hulu	6 surat kabar, 1 iklan	21,296,000.00	APBD		6 surat kabar, 1 iklan	23,425,600.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02	12	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Harian/Rapat Kantor	Kab. Kapuas Hulu	6.300 kali	76,560,000.00	APBD		6.300 kali	84,216,000.00
1	02	12	01	01	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah paket rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket	565,056,800.00	APBD		1 Paket	621,562,480.00
1	02	12	01	01	019	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Paket Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket	110,000,000.00	APBD		1 Paket	121,000,000.00
1	02	12	01	01	026	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah orang yang dibayar honorarium	Kab. Kapuas Hulu	5 orang	6,449,300.00	APBD		3 orang	7,094,230.00
1	02	12	01	01	031	Penyusunan RKA, DPA, DPPA	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	3 Dokumen	6,343,700.00	APBD		3 Dokumen	6,978,070.00
1	02	12	01	01	036	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah pegawai honorer yang dibayarkan honorarium	Kab. Kapuas Hulu	8 Orang	89,096,700.00	APBD		4 Orang	98,006,370.00
1	02	12	01	01	042	Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	Jumlah paket movev	Kab. Kapuas Hulu	4 kali	203,256,900.00	APBD		1 paket	223,582,590.00
1	02	12	01	01	078	Pengelolaan Kearsipan Dinas	Jumlah Paket kearsipan yang dikelola	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket	17,600,000.00	APBD		1 Paket	19,360,000.00
1	02	12	01	01	xxx	Penilaian Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	27,000,000.00	APBD		1 Dokumen	29,700,000.00
1	02	12	01	01	xxx	Kegiatan Penunjang Pemerintah Lainnya	Jumlah paket bantuan	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket	26,000,000.00	APBD		1 Paket	28,600,000.00
1	2	12	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		80%	6,007,440,000.00	APBD			581,184,000.00
1	02	12	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	Kab. Kapuas Hulu	5 unit motor	135,000,000.00	APBD		-	-
1	02	12	01	02	07	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah paket pengadaan gedung kantor	Kab. Kapuas Hulu	-	-	APBD		-	-
1	02	12	01	02	09	Penyediaan sarana pendukung Gedung Kantor	Jumlah paket penyediaan sarana pendukung gedung kantor	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket dekorasi interior kantor	330,200,000.00	APBD		1 Paket Pembangunan pagar kantor	363,220,000.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	12	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang akan diadakan	Kab. Kapuas Hulu	5 unit meja kerja, 5 kursi direktur, 1 set sofa dan meja laktasi, 4 set kursi ruang tunggu pelayanan, 4 fan, 3 meja pelayanan	456,000,000.00	APBD		5 unit meja kerja, 1 set sofa dan meja laktasi	56,000,000.00
1	02	12	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kab. Kapuas Hulu	-	-	APBD		1 Paket	-
1	02	12	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	1 Unit mobil, 11 unit motor	69,740,000.00	APBD		1 Unit mobil, 19 unit motor	76,714,000.00
1	02	12	01	02	xxx	Perencanaan pembangunan gedung kantor	Jumlah Paket	Kab. Kapuas Hulu	-	-	APBD		-	-
1	02	12	01	02	xxx	Penyediaan instalasi jaringan komunikasi data	Jumlah paket Penyediaan instalasi jaringan komunikasi data, LAN	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket	77,500,000.00	APBD		1 Paket	85,250,000.00
1	02	12	01	02	xxx	Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan	Jumlah paket	Kab. Kapuas Hulu	-	-	APBD		-	-
1	02	12	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		97,50%	38,775,000.00	APBD		97,50%	42,652,500.00
1	02	12	01	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Kab. Kapuas Hulu	-	-	APBD		38 Stel	-
1	02	12	01	03	005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas	Kab. Kapuas Hulu	40 Stel	38,250,000.00	APBD		38 Stel	38,775,000.00
1	2	12	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	463,764,400.00	APBD		80%	510,140,840.00
1	02	12	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Kapuas Hulu	16 Orang	193,764,400.00	APBD		16 Orang	213,140,840.00
1	02	12	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP OPD		BB	103,789,950.00	APBD		B	120,774,115.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	12	01	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	2,635,000.00	APBD		1 Dokumen	2,898,500.00
1	02	12	01	06	002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	2,434,300.00	APBD		2 Dokumen	2,677,730.00
1	02	12	01	06	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	4,833,400.00	APBD		1 Dokumen	5,316,740.00
1	02	12	01	06	006	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	2,434,300.00	APBD		2 Dokumen	2,677,730.00
1	02	12	01	06	012	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	4,833,400.00	APBD		1 Dokumen	5,316,740.00
1	02	12	01	06	030	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	2,693,000.00	APBD		1 Dokumen	2,962,300.00
1	02	12	01	06	036	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	2,550,000.00	APBD		1 Dokumen	2,805,000.00
1	02	12	01	06	042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	2,616,900.00	APBD		1 Dokumen	2,878,590.00
1	02	12	01	06	047	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	2,435,400.00	APBD		1 Dokumen	2,678,940.00
1	02	12	01	06	076	Penyusunan DUK dan Daftar Nominatif Pegawai	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	2,945,800.00	APBD		2 Dokumen	3,240,380.00
1	02	12	01	06	087	Penyusunan Inventarisasi aset SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	2,600,400.00	APBD		2 Dokumen	2,860,440.00
1	02	12	01	06	xxx	Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	-	-	APBD		2 Dokumen	-
1	02	12	01	06	xxx	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	10 Dokumen	24,366,650.00	APBD		10 Dokumen	26,803,315.00
1	02	12	01	06	xxx	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-0) SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	10 Dokumen	3,066,800.00	APBD		10 Dokumen	3,373,480.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	12	01	06	xxx	Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	49,349,300.00	APBD		1 Dokumen	54,284,230.00
1	02	12	01	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah minat investor		3 minat	680,159,700.00	APBD		3 minat	805,077,130.00
1	2	12		15	013	Pameran Investasi Daerah	Jumlah minat investor	Kab. Kapuas Hulu	3 minat	277,538,800.00	APBD		3 Investor	305,292,680.00
1	02	12	01	15	015	Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah laporan	Kab. Kapuas Hulu	4 Laporan	51,728,600.00	APBD		4 Laporan	56,901,460.00
1	02	12	01	15	019	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Kab. Kapuas Hulu	50 Perusahaan	350,892,300.00	APBD		45 Perusahaan	385,981,530.00
1	02	12	01	15	xxx	Penyusunan Data Statistik Publikasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	-	-	APBD		-	-
1	02	12	01	15	xxx	Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah laporan	Kab. Kapuas Hulu	4 Laporan	51,728,600.00	APBD		4 Laporan	56,901,460.00
1	02	12	01	15	xxx	Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal	Jumlah bahan pameran berupa leaflet, brosur dan CD	Kab. Kapuas Hulu	-	-	APBD		-	-
1	2	12	1	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM		50 Perusahaan	549,169,100.00	APBD		50 Perusahaan	589,086,010.00
1	02	12	01	16	013	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kecamatan yang mendapat sosialisasi	Kab. Kapuas Hulu	-	-	APBD		-	-
1	02	12	01	16	014	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana OSS dan SiCantik Kab. KH	Jumlah paket	Kab. Kapuas Hulu	-	-	APBD		-	-
1	02	12	01	16	015	Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diundang kegiatan wokshop	Kab. Kapuas Hulu	-	-	APBD		-	-
1	02	12	01	16	018	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi	Kab. Kapuas Hulu	-	-	APBD		-	-
1	02	12	01	16	xxx	Pengadaan SIMYANDU	Jumlah sistem	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket	105,000,000.00	APBD		1 Paket	105,000,000.00
1	02	12	01	16	xxx	Penataan dan Perumusan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket	45,000,000.00	APBD		1 Paket	45,000,000.00

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2021				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	12	01	16	xxx	Rapat Koordinasi teknis perencanaan penanaman modal	Jumlah koordinasi penanaman modal	Kab. Kapuas Hulu	3 kali	65,818,500.00	APBD		3 kali	72,400,350.00
1	02	12	01	16	xxx	Penyusunan rencana kebutuhan investasi	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	333,350,600.00	APBD		1 Dokumen	366,685,660.00
1	2	12	1	19		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan		3-5 Hari	814,651,970.00	APBD		3-5 Hari	886,790,883.00
1	02	12	01	19	001	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan	Kab. Kapuas Hulu	4 Kecamatan	116,954,600.00	APBD		4 Kecamatan	128,650,060.00
1	02	12	01	19	013	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	89,584,000.00	APBD		1 Dokumen	98,542,400.00
1	02	12	01	19	014	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling	Jumlah kecamatan yang dilakukan fasilitasi	Kab. Kapuas Hulu	3 Kecamatan	55,597,800.00	APBD		3 Kecamatan	61,157,580.00
1	02	12	01	19	017	Penataan Perizinan	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan	Kab. Kapuas Hulu	3-5 hari	83,079,480.00	APBD		3-5 hari	91,387,428.00
1	02	12	01	19	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi teknis ke Luar Daerah	jumlah rapat dan konsultasi	tentative	1 tahun	74,776,800.00	APBD		1 paket	82,254,480.00
1	02	12	01	19	019	Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah publikasi	Kab. Kapuas Hulu	2 Publikasi	301,662,350.00	APBD		2 Publikasi	331,828,585.00
1	02	12	01	19	020	Penyusunan Laporan Perkembangan PTSP Kabupaten	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	5 Dokumen	84,518,500.00	APBD		5 Dokumen	92,970,350.00
JUMLAH										10,349,847,800.00				11,384,832,580.00

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2021 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2021, dimana Renja Tahun 2021 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seluruh aparatur secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2021.
4. Renja Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan evaluasi dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun catatan penting yang menjadi saran bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu ke depan berdasarkan hasil evaluasi kinerja DPMPSTSP Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 adalah :

1. Agar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu memimpin perubahan guna meningkatkan kinerja yang lebih baik agar tercipta penguatan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu agar meningkatkan integritas, disiplin dan profesionalisme kerja, serta menerapkan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja dan standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu akan sangat diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan yang lebih baik dan meningkatnya realisasi investasi di daerah.